

16/11/155

**BEBERAPA ISU TENTANG
PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
DI SEKOLAH**

TANGGAL	05 MAR 1997
BIDANG	
SEKOLAH	K
KELAS	KI
NO. DAFTAR	17/K/97-16, (2)
ALAMAT	371.464 YUSUF

OLEH

DR. A. MURI YUSUF, MPD

**DISAMPAIKAN PADA SEMINAR DAN LOKAKARYA
POLA 17 BIMBINGAN DAN KONSELING
DI SEKOLAH , PADA TANGGAL 4-7-1995**

**MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG**

**BEBERAPA ISU TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN
DAN KONSELING (BK) DI SEKOLAH**

A. Pendahuluan

Dalam kurun waktu tiga puluh tahun belakangan ini perubahan sosial dalam masyarakat berlangsung dengan cepat sekali. Perkembangan ilmu dan teknologi serta penyebaran informasi dari manca negara menjadi pemicu munculnya berbagai perubahan tersebut. Teknologi berkembang, teori-teori ilmiah bertambah, adat sosial berubah, nilai-nilai bergeser, struktur organisasi kemasyarakatan berubah, dan orang pun berubah (Peter Russell & Roger Evans, 1992:1).

Di Indonesia, tatanan kehidupan masyarakat agraris secara bertahap mulai ditinggalkan dan pola kehidupan masyarakat industri dan teknologi menyusup dengan cepat. Semuanya itu berawal dari pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat sebagai akibat sentuhan nilai budaya maju. Dari sisi lain dapat pula dikatakan bahwa apa yang dilakukan anggota masyarakat itu sebenarnya adalah upaya anggota masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Namun tidak dapat pula diingkari bahwa perubahan itu menyulut pula timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat, seperti: pengangguran, putus sekolah, kenakalan remaja, perkelahian pelajar, minuman keras (alkoholisme), malas belajar, prestasi belajar yang rendah, kurang mampu menyesuaikan diri, kurang kenal diri, menyendiri dan terpisah dari masyarakat sekitarnya.

Dalam kondisi demikian, keberadaan Bimbingan dan Konseling meniupkan secercah harapan dan udara segar demi masa depan yang lebih bermakna bagi segelintir manusia pada saat kehadirannya di bumi persada Indonesia, namun sebenarnya kebermaknaan profesi bimbingan dan konseling menyentuh semua individu dalam latar kondisi masing-masing, agar setiap individu berkembang optimal dan maksimal.

Jalan panjang yang telah ditata belum semuanya marak dan

dapat dukungan. Keterkungkungan dan kerancuan dalam pemberian makna pada profesi bimbingan dan konseling, mempersempit bidang garapan dan menipiskan kepedulian. Pada uraian selanjutnya akan ditampilkan berbagai isu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.

B. Beberapa Kritik dan Isu

Meskipun pelayanan bimbingan dan konseling di Amerika pada tahun 1960-an mendapatkan perhatian dan prioritas, namun beberapa waktu kemudian meluncur pula berbagai kritik yang di arahkan pada pelaksana profesi ini.

Pine (1974) mengemukakan beberapa kritik terhadap petugas bimbingan, antara lain: (1) guru pembimbing mengisolasi diri dari personil sekolah lainnya, (2) guru pembimbing lebih banyak bekerja dengan siswa yang nakal serta siswa lain yang membutuhkan bantuan khusus serta mengabaikan siswa biasa yang kebutuhannya tidak tentu arahnya, (3) guru pembimbing kurang dapat bertindak sebagai sumber dalam bekerja sama dengan guru dan orang tua dalam menangani program sekolah, (4) guru pembimbing tidak efektif dalam menangani siswa yang menimbulkan kerusakan, (5) guru pembimbing takut terhadap tuntutan akuntabilitas, (6) pekerjaan guru pembimbing kurang memberikan hasil yang berarti, dan (7) guru pembimbing sekolah hanya tahu sedikit tentang dunia kerja di luar pendidikan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa guru pembimbing sekolah dianggap bertindak bodoh, masa bodoh dan bekerja tidak dengan sepenuh hati dengan anak-anak; tidak memakai prosedur yang semestinya dan tidak terlatih untuk menggunakan teknik dan prosedur profesional.

Kritik lain muncul dari Aubrey dan Warnath (Nugent, 1981:105). Ia menyatakan bahwa banyak guru pembimbing menjadi agen institusi mengenai tugas-tugas administrasi di sekolah. Petugas bimbingan lebih banyak melakukan pekerjaan administrasi sekolah, ketimbang tugas bimbingan dan konseling.

Sedangkan Brossard (Nugent, 1981:106) mengemukakan pula bahwa guru pembimbing rendah mutunya dalam latihan dan kepribadian serta mereka tidak dapat menciptakan hubungan intim dengan siswa.

Keraguan tentang kemampuan guru pembimbing dalam melaksanakan tugas di sekolah muncul pula dari hasil studi Hart dan Prince (Nugent, 1981:106). Ia menyatakan kekurangmampuan guru pembimbing itu terfokus pada aspek membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadinya.

Kelemahan lain diketahui pula dari hasil penelitian Bucker (Nugent, 1981:107). Ia mengemukakan bahwa guru pembimbing sekolah tidak mengetahui apa peran mereka yang sebenarnya di sekolah.

Di Indonesia, profesi bimbingan dan konseling telah berkembang cukup lama. Diawali dengan dibukanya jurusan Bimbingan dan Konseling (Penyuluhan) di IKIP Bandung pada tahun 1963/1964, dan kemudian diberlakukannya kurikulum SMA Gaya Baru, dengan keharusan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dilanjutkan dengan lahirnya kurikulum 1968, didirikannya Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) dengan keharusan adanya unit bimbingan dan konseling, serta lahirnya kurikulum 1975, merupakan fondasi dan pilar penyangga keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam konteks pendidikan seutuhnya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan suatu hal yang esensial, apabila para pengelola dan pelaksana pendidikan menginginkan setiap siswa berkembang secara optimal dan penuh, yaitu menjadi individu yang: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berbudi pekerti luhur, (3) memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, (4) sehat jasmani dan rohani, (5) berkepribadian mantap dan mandiri, serta (6) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Mereka itu adalah individu yang terrefleksi pada dirinya rasa percaya diri, sabar, bertanggung jawab, memiliki rasa aman, bebas dari rasa cemas, bebas dari ancaman, berwawasan luas, berani mengambil resiko serta menikmati hidup

dan kehidupannya berlandaskan keyakinannya akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa.

Di dalam perkembangannya, bimbingan dan konseling telah memberikan berbagai sumbangan positif dalam membantu perkembangan siswa di sekolah, namun masih dirasakan adanya berbagai isu yang muncul di antara pengguna jasa bimbingan dan konseling. Di antara isu-isu tersebut adalah:

Pertama, guru pembimbing sekolah lebih banyak bersifat menunggu klien, bukan mencari dan menemukan klien. Mereka lebih banyak duduk di kantor atau pada unit pelayanan bimbingan dan konseling menunggu datangnya siswa secara sukarela untuk menyampaikan informasi tentang dirinya atau masalah-masalah yang dihadapinya. Guru pembimbing hanya menangani siswa-siswa yang dikirimkan oleh guru, wali kelas dan kepala sekolah atau tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Mereka kurang berinisiatif untuk menggugah siswa datang pada unit pelayanan bimbingan dan konseling dengan sukarela. Mereka belum berupaya secara intensif untuk menemukan siswa-siswa yang perlu mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat siswa serta kondisi psikologis lain yang menyertainya sehingga peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin.

Dengan kata lain guru pembimbing bersikap lebih banyak "menunggu" bola, bukan "menjemput" bola. Andaikata tidak ada siswa yang datang, atau merasa dirinya tidak perlu datang ke unit BK, maka ruang tunggu itu akan sunyi dari pengunjung, sehingga guru pembimbing terbebas dari kerja yang seharusnya banyak yang dapat dilakukannya demi perkembangan peserta didik sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya.

Kedua, guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan prajabatan bimbingan dan konseling belum menunjukkan kelebihan kemampuan profesionalnya dalam menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas bimbingan dan konseling di sekolah, apabila dibandingkan dengan guru pembimbing yang berasal dari bukan jurusan Bimbingan dan Konseling.

Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, nilai dan sikap yang

dimiliki guru pembimbing yang berlatar belakang dari jurusan BK belum memberi warna khusus bagi mereka dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa yang membutuhkannya.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan di SMA Kodya Bandung dan SMA Pontianak, ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara unjuk kerja guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan jurusan BK dan bukan dari jurusan BK. Azis Mahfuddin (Achmad Sanusi, et al., 1991:72) menunjukkan bahwa di beberapa SMA Kodya Bandung, 80% dari guru pembimbing yang menjadi responden penelitiannya memiliki pengetahuan, kepribadian dan keterampilan menciptakan konseling yang memadai. Dalam penelitian ini, sampel penelitiannya adalah semua petugas bimbingan (termasuk guru pembimbing bukan dari jurusan BK). Hal yang senada ditemukan pula oleh M.Asrori (Achmad Sanusi, et al., 1991:72). Ia mengungkapkan bahwa di beberapa SMA Kodya Pontianak, unjuk kerja guru pembimbing dapat diklasifikasikan dalam kategori sedang, namun dalam latihan membina empati, kehangatan, kepedulian, keterbukaan, penerimaan dan merefleksikan perasaan; para guru pembimbing cukup tinggi, tetapi mereka belum memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal mengkonkritkan pembicaraan, membuka konseling, menjelajahi masalah, memberi informasi, merumuskan tujuan, memberikan dorongan, merangkum hasil pembicaraan dan menutup konseling. Dalam penelitian ini sampel penelitiannya lebih banyak yang bukan berasal dari jurusan BK. Hasil-hasil penelitian tersebut di atas belum dikaitkan dengan standar perilaku profesional.

Ketiga, layanan bimbingan dan konseling di sekolah belum memberikan nilai tambah dalam pembinaan dan perkembangan siswa.

Walaupun layanan bimbingan dan konseling telah dilaksanakan oleh guru pembimbing di sekolah sejak beberapa waktu yang lampau, ternyata pembinaan dan perkembangan siswa tidak melebihi daripada pembinaan yang dilakukan oleh guru bidang studi melalui pengajaran atau oleh walikelas dan pimpinan sekolah.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah belum bermakna dan berarti secara utuh dan menyeluruh. Tanpa bimbingan dan konseling di sekolah pendidikan juga terlaksana dengan lancar.

Keempat, guru pembimbing belum mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang bermakna sesuai dengan keperluan dan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi lingkungan.

Program yang ada dan yang dilakukan belum mampu menunjang program sekolah sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan secara utuh. Guru pembimbing baru mampu melaksanakan sebagian kecil tugas yang seharusnya mereka lakukan. Mereka masih sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan membantu guru dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Konsultasi, koordinasi dan kerjasama diantara sesama tenaga kependidikan di sekolah belum tergarap dengan tuntas sehingga sumbangan langsung bagi guru dan tenaga yang lain dalam upaya menyukseskan program sekolah secara menyeluruh belum nampak dengan jelas.

Kelima, tenaga kependidikan lainnya, seperti guru bidang studi, wali kelas, laboran, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah belum mendukung sepenuhnya pelaksanaan bimbingan dan konseling secara utuh dan menyeluruh di sekolah. Mereka lebih banyak mengutamakan penanaman pengetahuan dan kemampuan, namun kurang memperhatikan pembinaan dan perkembangan kepribadian siswa secara utuh. Masalah-masalah pribadi, sosial dan masalah belajar yang terdapat di antara siswa belum tergarap dan terungkap dengan baik. Kondisi inipun berkaitan erat pula dengan masih sedikit dan terbatasnya upaya guru pembimbing dalam memasyarakatkan bimbingan dan konseling terhadap masyarakat sekolah. Guru bidang studi masih ada yang meragukan peranan bimbingan dan konseling dalam membantu mengembangkan dan membangkitkan potensi peserta didik. Mereka juga menganggap belum ada sumbangan nyata guru pembimbing sekolah dalam membantu guru bidang studi melakukan penyempurnaan/ perbaikan proses belajar-mengajar sehingga memungkinkan peserta didik belajar lebih tekun, lebih bersemangat, dan lebih berhasil.

Keenam, fasilitas fisik dan keuangan yang disediakan sekolah belum dapat menjamin terlaksananya program bimbingan dan konseling yang mendukung dan memperlancar tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Kepedulian yang masih terbatas dari masyarakat sekolah membawa pula efek sampingan pada pelaksanaan program bimbingan di sekolah.

Berkenaan dengan kemampuan guru pembimbing di sekolah dewasa ini, terlontar pula berbagai isu antara lain: guru pembimbing sekolah adalah polisi sekolah (Prayitno, 1987:14), guru pembimbing sekolah yang berlatar belakang pendidikan strata nol (S0) tidak siap pakai (Munandir,1986:2), serta berbagai ungkapan lain seperti guru pembimbing sekolah adalah petugas administrasi, pelaksana koperasi sekolah, pemberi nasehat, pelaksana kegiatan ekstra kurukuler, pengawas keamanan sekolah, pelaksana absensi sekolah, petugas piket, dan mengawasi anak-anak yang bermasalah, menyelesaikan perkelahian pelajar, memanggil orang tua siswa anak yang bolos, berkelahi dan sering menimbulkan keributan dan keranjang masalah

Keadaan tersebut sejalan pula dengan hasil studi yang penulis lakukan pada beberapa SMA Negeri di Padang. Di antara temuan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, guru pembimbing yang melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki ijazah: (1) Sarjana jurusan Bimbingan dan Konseling (20,34%), (2) Sarjana Muda dan D3 jurusan Bimbingan dan Konseling (45,75%), (3) Sarjana Pendidikan,D3 dan Sarjana Muda yang berasal bukan dari jurusan Bimbingan dan Konseling dan telah mengikuti penataran dalam bidang Bimbingan dan Konseling (33,89%).

Kedua, guru pembimbing yang ada masih terbatas, baik ditinjau dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dilihat dari segi kualitasnya tenaga yang ada masih banyak lulusan Sarjana Muda dan D3 yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang terbatas dalam bidang Bimbingan dan Konseling sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi. Mereka masih banyak memandang bimbingan sebagai upaya bantuan dalam penyembuhan siswa-siswa yang mengalami

gangguan/ kelainan, namun kurang memperhatikan upaya pemahaman, pencegahan, pemeliharaan dan pengembangan semua siswa di sekolah sesuai dengan potensi, minat dan bakat mereka.

Guru pembimbing yang berasal dari bukan jurusan Bimbingan dan Konseling mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang masih terbatas dalam aspek dan materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling secara profesional di sekolah. Di dalam keterbatasan tersebut tidak semuanya pula mampu mereka lakukan. Namun suatu hal yang menarik untuk disimak adalah mereka melakukan berbagai kegiatan bimbingan dan konseling yang biasa dilakukan di sekolah.

Guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Muda, PGSLA, dan D3 jurusan Bimbingan dan Konseling mempunyai pengetahuan yang cukup memadai, namun mempunyai keterbatasan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan dan konseling yang biasa dilaksanakan di sekolah. Mereka ini sebagian menjadi koordinator bimbingan dan konseling di sekolahnya.

Guru pembimbing yang berjazah S1 jurusan Bimbingan dan Konseling mempunyai dasar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, namun tidak semua kegiatan bimbingan dan konseling mampu dan mereka lakukan di sekolah.

Ketiga, sasaran utama kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah adalah siswa yang sering: (1) absen, (2) berkelahi, (3) meninggalkan kelas/sekolah pada jam belajar, (4) terlambat dan (5) siswa-siswa yang mengalami masalah tertentu.

Keempat, tujuan utama kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk mendisiplinkan siswa dan membantu siswa yang mengalami masalah-masalah seperti pada point ketiga di atas.

Kelima, fasilitas dan perlengkapan yang disediakan pada sekolah-sekolah tersebut untuk pelaksanaan program bimbingan dan konseling belum memadai. Ruang yang ada sangat terbatas, demikian juga fasilitas lain seperti almari, kursi, meja dan dana yang disediakan.

Keenam, lingkungan sekolah dan masyarakat belum menunjukkan kepedulian yang lebih mendalam dan serius terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru bidang studi, wali-kelas, kepala sekolah lebih mengutamakan penanaman pengetahuan dan kemampuan, sedangkan perkembangan kepribadian, seperti sikap, kebiasaan, kemauan, ataupun perkembangan emosional dan sosial siswa kurang mendapat perhatian. Di samping itu orang tua sering tidak datang kalau dipanggil sehubungan dengan perkembangan anaknya di sekolah.

Ketujuh, guru pembimbing sekolah merasakan bahwa organisasi profesi bimbingan seperti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), Ikatan Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN), belum banyak membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru pembimbing maupun dalam menggairahkan tumbuhnya layanan bimbingan dan konseling profesional. Bahkan informasi baru tentang bimbingan dan konseling sangat jarang mereka terima.

Kedelapan, pengakuan masyarakat, termasuk masyarakat sekolah terhadap profesi bimbingan dan konseling belum penuh dan tuntas. Kerjasama dengan tenaga kependidikan yang lain di sekolah memang ada, namun perwujudan secara nyata dalam program bimbingan dan konseling belum terorganisasikan dengan baik.

C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

Kajian menyeluruh tentang profesi BK di sekolah hendaklah dihipotesiskan dalam keterpaduan analisis. Isu dan kelemahan adalah salah satu dimensi dari empat dimensi yang perlu mendapat perhatian.

Banyak kekuatan yang telah dimiliki oleh profesi ini antara lain adanya lembaga pendidikan penghasil konselor yang berkualitas sampai dengan jenjang S3, adanya organisasi profesi (IPBI, IPKON, ISKIN, IGPI) yang siap berfungsi secara utuh dan mampu meningkatkan profesionalitas guru pembimbing serta mengarahkan guru pembimbing menuju pencapaian standar profesional.

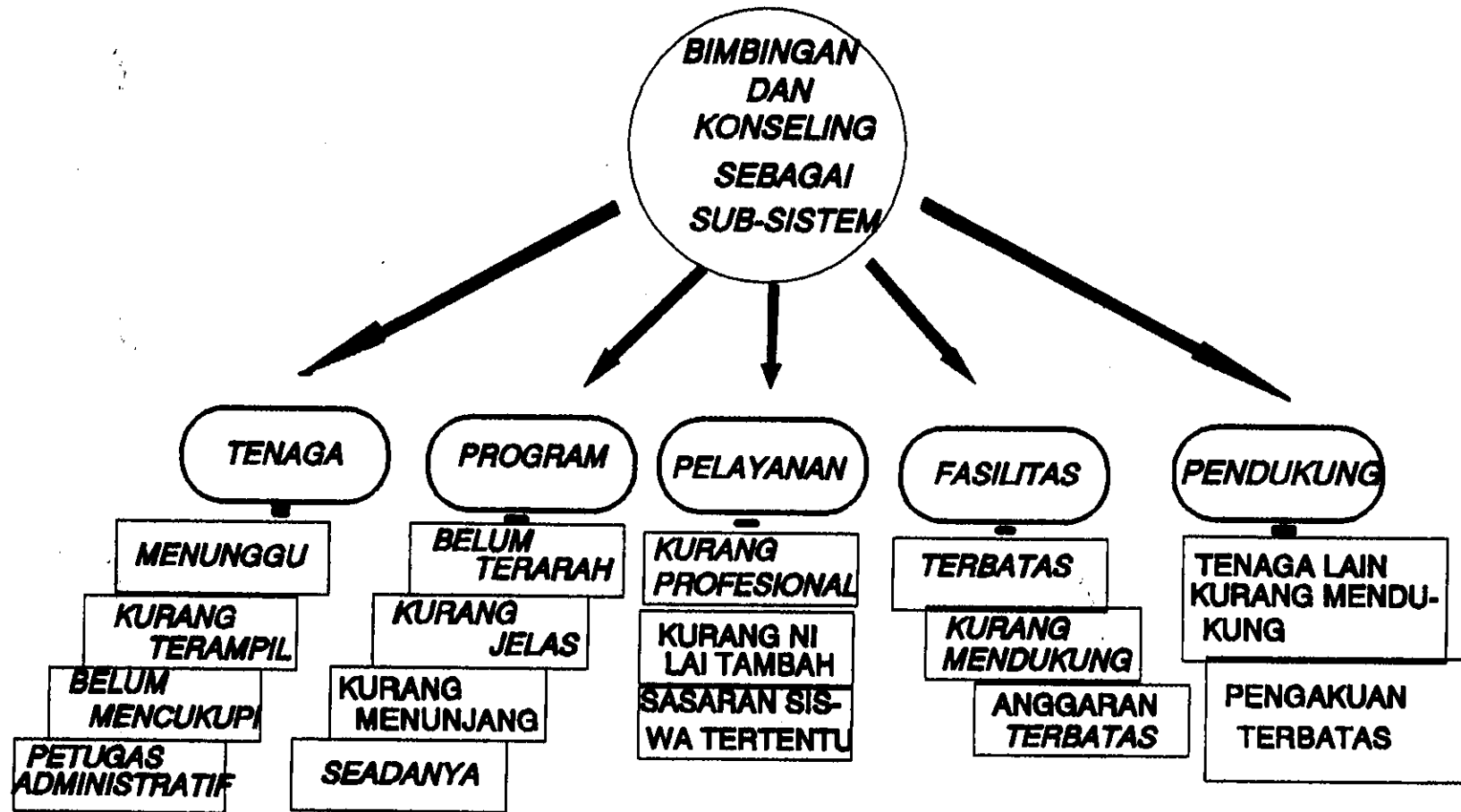
Di samping itu peluang untuk berkembang optimal sudah ada

17/K/97-6, (2). K1
371.404
YUS
6,

dan tersedia. Melalui FP No. 29/1989, keberadaan profesi bimbingan dan konseling di SMA sudah tuntas. Tinggal lagi bagaimana guru pembimbing memberi arti pada peluang tersebut sehingga pengakuan masyarakat menjadi tuntas pula. Di samping itu dengan keluarnya SK Menpan No: 84/1993, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta SK Bersama Kepala BAKN dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0433/1993, jelas sudah: "apa tugas guru mata pelajaran, guru kelas, guru pembimbing dan guru praktik". Peluang itu menjadi lebih tuntas lagi dengan dikeluarkannya SK Mendikbud No:025/O/1995, yang merinci tugas pokok masing masing jenjang jabatan guru.

Kekuatan, kelemahan dan peluang profesi BK untuk berkembang secara profesional terbuka sudah namun ancaman masih menggelutinya. Pelayanan BK di sekolah kurang profesional. Untuk itu guru pembimbing, lembaga penghasil guru pembimbing dan organisasi profesi bimbingan harus meninggalkan kekurang pedulian pada kualitas layanan yang diberikan selama ini, menjadi sadar dan peduli akan pentingnya pelayanan BK yang bersifat profesional. SEMOGA.

BEBERAPA KRITIK DAN ISU TENTANG BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH



MILIK UPJ
IKIP PADANG